

**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2011 DI
DESA SUNGAI TANANG KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S1) di Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA

Oleh

ABD. HARIS
10775000337

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

ABDUL HARIS “ Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka Analisis penggunaan ADD pada desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar ditinjau dari beberapa indikator dalam Analisis penggunaan ADD berada di persentase sebesar 53,4% dari tanggapan Kepala Desa dan 41,6% dari tanggapan masyarakat dengan pengukuran variabel dengan nilai antara 34%-66% berada pada kategori cukup baik.. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing pihak yaitu instansi terkait dan keluhan-keluhan dari masyarakat setempat, tetapi perbedaan pendapat tersebut masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan keluhan dari masyarakat desa Sungai Tanang kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar dapat dijadikan batu loncatan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk masyarakat.

Kata Kunci : Analisis, penggunaan, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islamiyah-Nya kepada segenap umat di jagat raya ini sebagai hidayah dan *irsyadah* yang dapat menjamin kebahagiaan hidup ummat manusia di dunia dan *ukhrowi*. Dengan rahmat dan karunia Allah dan diringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari semua pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: **“Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**.

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu banyak terdapat kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Memang tidak ada gading yang tidak retak dan tidak ada manusia yang tidak *khilaf* dan *alfa*. Dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari banyaknya bantuan dari semua pihak, dan penulis merasa berkewajiban untuk berterimakasih yang selam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Riau
2. Bapak Dr, Mahendra Romus SP. M.Ec, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
3. Ibu Khotimah, M.Ag selaku ketua Jurusan Perbandingan Agama.
4. Bapak Afrizal S. Sos M. Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Rusdi S. Sos M. Si selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
6. Bapak Mahmuzar, M. Hum sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Bapak H. Suhaimi LC selaku kepala Desa Sungai Tanang dan Armiadi A.Md selaku Sekretaris Desa yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Untuk yang mulia Ayahanda Baharuni dan Ibunda Haironi yang selalu dan akan selalu ada disetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darah ku. Idola yang selalu ku kagumi yang telah memberi kehidupan untuk ku, mentari penerangan dan telaga penyejuk ku dan yang menjadikan ku merasa hebat.
10. Teman-teman seperjuang yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu memberikan motivasi untuk penulis.

Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan, sekali lagi penulis ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-sebesarnya atas kekurangan dan kesalahan penulis.

Billahi Taufiq walhidayah,

Pekanbaru, 29 Januari 2013
Penulis

ABD. HARIS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Alokasi Dana Desa.....	10
2.1.1 Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD	12
2.1.2 Pembinaan dan Pengawasan ADD	13
2.2 Keuangan Negara	14
2.3 Keuangan Daerah	17
2.4 Kebijakan	19
2.5 Pemberdayaan	23
2.6 Manajemen.....	25
2.7 Pengertian Evaluasi.....	29
2.8 Partisipasi	32
2.9 Penelitian Terdahulu	34
2.10 Kerangka Pikiran	35
2.11 Konsep Operasional	36
2.12 Indikator Variabel	39
2.13 Hipotesa	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2 Jenis Data	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4 Populasi dan Sampel	42
3.5 Analisis Data	43
BAB IV TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
4.1 Geogarfis dan demografis	44
4.2 Agama dan Pendidikan	46
4.3 Pemerintahan.....	47
4.4 Sosial Ekonomi Dan Adat Istiadat	50
4.5 Sarana Transportasi Dan Komunikasi.....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Identitas Responden	53
5.1.1 Jenis Kelamin.....	53
5.1.2 Umur	54
5.1.3 Jenis Pekerjaan.....	55
5.2 Tujuan Program ADD	56
5.3 Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 untuk Program ADD	60
5.4 Hambatan-hambatan	72
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Alokasi Dana Desa Sungai Tanang Tahun 2009-2013	6
2.1 Variable Penelitian	39
3.1 Populasi	42
4.1 Kasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	45
4.2 Kasifikasi Penduduk Menurut Umur	45
4.3 Jumlah Saran Ibadah	46
4.4 Jumlah Sarana Pendidikan	47
5.1 Jenis Kelamin Responden Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	54
5.2 Umur Responden Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	54
5.3 Jenis Pekerjaan Responden Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	55
5.4 Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Input	61
5.5 Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Proses	62
5.6 Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Hasil	63
5.7 Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Dampak	64
5.8 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Input	65
5.9 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Proses	66
5.10 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Hasil	68
5.11 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Dampak	69
5.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Desa Mengenai Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Desa Sungai Tanang	70
5.13 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Desa Sungai Tanang	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikiran Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.....	36
4.1 Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Tonang.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, Daerah Propinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap Daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur undang-undang. Pemerintahan daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk Provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam UU nomor 32 Tahun 2004 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada

pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*).

Meskipun programnya baik tetapi seiring tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering dijumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya. Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam PP 72/2005 tentang Desa, dalam PP ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi

Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa adalah:

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri yang mengambil bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, karena dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat sehingga memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan dan penyelewengan.

Adapun data alokasi dana Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara dari bulan Januari sampai Desember 2011, terlampir :

Selanjutnya penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No 9 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 2 menyebutkan pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksud kan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.

Adapun tujuan ADD yaitu :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- h. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya (Nurcholis, 2011: 89).

Kebijakan umum program pemberdayaan desa/kelurahan merupakan pengejawantahan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 dan bentuk implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar. Prinsip dasar kebijakan program pemberdayaan desa melalui Alokasi Dana Desa dalam rangka otonomi menuju desa mandiri adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek pembangunan
2. Pemerataan pengalokasian dana dan kegiatan pembangunan keseluruhan Desa/Kelurahan sehingga tidak ada lagi yang tidak tersentuh oleh pembangunan
3. Menciptakan peluang kerja untuk memperkecil pengangguran
4. Menciptakan bertambahnya uang yang beredar di pedesaan

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah Alokasi Dana Desa dari tahun 2009 sampai 2013 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Tabel.1.1
Alokasi Dana Desa Sungai Tanang Tahun 2009-2013

No	Tahun	Dana ADD
1	2009	Rp. 234.000.000,-
2	2010	Rp. 234.000.000,-
3	2011	Rp. 253.000.000,-
4	2012	Rp. 253.000.000,-
5	2013	Rp. 248.000.000,-

Sumber: data Desa Sungai Tanang 2013

Desa Sungai Tanang Merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang menerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar yakni berdasarkan catatan pemerintah desa ADD yang di terima berjumlah Rp. 253.000.000, namun Alokasi Dana Desa yang diberikan pada 2011 belum digunakan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan awal seta melakukan wawancara masyarakat serta perangkat desa ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penggunaan ADD di desa yang terdapat di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara lebih diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat, BPD dan lembaga yang di akui desa dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.
2. Penggunaan ADD di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara untuk biaya pembangunan sarana tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan lambannya pencairan dana ADD tersebut.
3. Dari data penggunaan ADD pada Belanja Operasonal Kantor dan Organisasi Desa pada desa Sungai Tanang melebihi jumlah yang ditetapkan dalam pedoman penggunaan ADD kabupaten Kampar diketahui bahwa desa tersebut tidakmasuk dalam desa sulit dan sangat sulit.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**.

1.2. Perumusan Masalah

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. Dari tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui pemerintah daerah berupaya memberdayakan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan melalui penggunaan ADD yang tepat guna.

Tetapi Penggunaan ADD di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara belum secara efektif dan efisien contohnya Penggunaan ADD di desa yang terdapat di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara lebih diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa sementara untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan pokok dalam penelitian ini yakni *“Apakah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2011 ?”*.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2011.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya dalam bidang administrasi pembangunan.
- b. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan efektif.
- c. Secara akademis, yaitu sebagai bahan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara Penggunaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian: kita harus menggalakkan bahasa Indonesia, dengan demikian penggunaan merupakan salah satu perbuatan seseorang dalam menggunakan ataupun mengelola sesuatu baik barang maupun jasa. Mengacu pada definisi tersebut penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna ADD (pemerintah desa) dalam mengelola dan menata usahakan Alokasi dana desa (ADD) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan ADD harus gunakan secara efektif dan efisien.

Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Tujuan alokasi dana:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan infrastruktur perdesaan
- d. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Rumusan yang digunakan dalam alokasi dana desa, adalah:

- a. asas marata, yaitu besarnya alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- b. asas adil, yaitu besarnya bagian alokasi desa berdasarkan nilai bobot (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besar prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah ADDM 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa dalam APBD kab/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Dimana mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kab/kota.

Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

- a. biaya perbaikan sarana public dalam sekala kecil
- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
- c. biaya untuk pngadaan ketahanan pangan
- d. perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. teknologi tepat guna
- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. pengembangan social budaya
- h. kegiatan lain yang dianggap penting

2.1.1. Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai berikut:

- a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD

- b. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur structural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kepada tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Sedangkan permasalahan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping tim pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kab/kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

2.1.2. Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari kab/kota kepada desa. Pemerintah kab/kota dan kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan Pengawasan pemerintah kab/kota meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa.
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan Pengawasan camat meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD.
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

2.2. Keuangan Negara

Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan pada pasal ayat 1 sebagai berikut; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan tentang keuangan negara adalah sebagai berikut;

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;

- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Arifin Soeria Atmaja. P (2009: 70), menjelaskan tentang keuangan negara, keuangan negara tidak bisa mendefinisikan dalam suatu definisi tertentu, karena definisi keuangan negara bersifat politis, tergantung kepada sudut pandang, sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN, sedang apabila bicara keuangan dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBD, demikian seterusnya dengan Perjan, PN-PN maupun Perum.

Menurut Hekinus Manao (*Hukumonline*, 2009: 2), keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, Keuangan Negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggungjawabkannya.

Muhammad Djumhana (2007: 12) menjelaskan pengertian keuangan negara tersebut dapat meliputi;

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan negara
4. Pengeluaran negara
5. Penerimaan daerah
6. Pengeluaran daerah
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, baik berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dan daerah
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, dan/atau kepentingan umum
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Hariyadi B. Sukamdani (2009: 1) menjelaskan bahwa keuangan negara sesuai Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Sementara Erman Radjagukguk (*Hukum Online*, 2009: 3), menjelaskan bahwa keuangan negara dengan kerugian negara, berkaitan dengan apakah kekayaan BUMN merupakan keuangan negara, ia menegaskan bahwa kekayaan negara menyangkut BUMN berbentuk Persero bukanlah harta kekayaan BUMN secara keseluruhan. Melainkan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN yang berbentuk saham yang dimiliki oleh negara.

2.3. Keuangan Daerah

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membuka seluasnya kesempatan bagi para pejabat daerah untuk mengeksplorasi potensi kekayaan daerah.

Tentang keuangan daerah ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 berikut ini; Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Selanjut keuangan daerah juga diatur dalam pasal 1 ayat 17 sampai 23 berikut ini;

“(17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. “(18) Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. “(19) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

“(20) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. “(21) Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. “(22) Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah. “(23) Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Kuangan Daerah merupakan bagian dari keuangan negara, oleh karena itu keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan/penerimaan daerah

terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta (2003: 86) menjelaskan bahwa sumber pendataan asli daerah yang dalam bentuk retribusi daerah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha, dan
- c. Retribusi perizinan tertentu

Kristian Widya Wicaksono (2006: 41) menjelaskan keberadaan Pemerintah Daerah (Pemda), dalam konteks otonomi daerah, bertujuan untuk menyediakan pelayanan prima dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, Pemda dinilai memiliki kompetensi untuk menterjemahkan keinginan masyarakat secara lebih akurat dibandingkan institusi vertikal pemerintah lainnya. Pada sisi lain, keyakinan tersebut turut mendorong Pemda sebagai institusi publik untuk secara berkesinambungan mampu melaksanakan *good governance* dalam seluruh aspek pelaksanaan pemerintahan.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.4. Kebijakan

Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti Wiliam Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan discretion, yang dapat diartikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kasuistik untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu. Keputusan yang bersifat kasuistik (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan. Seseorang minta “kebijaksanaan” seorang pejabat untuk perlakukan

secara istimewa atau tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada, yang biasanya justru ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (*public policy*).

Koryati (2005 : 7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Nugroho (2004 : 101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dan untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dilihat dari konsep kebijakan pemerintah, Anderson dalam Koryati (2005 : 7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturannya sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugh Heglo dalam Dunn (2003: 29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*). Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Charles Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu :

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
2. Rencana atau proposals yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (effect) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

Nogi.S (2003: 1) mengemukakan bahwa seseorang pemimpin haruslah mampu memberikan suatu kebijakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami adanya pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah (*intra-governmental*) sebagai suatu keseluruhan.

Sedangkan Cherma dan Rondinelli dalam Sumaryadi (2005 : 79) mengemukakan bahwa kebijaksanaan desentralisasi dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

1. Tercapainya tujuan kebijaksanaan desentralisasi yang berwujud pelaksanaan otonomi daerah.
2. Meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah daerah dalam hal perencanaan, memobilisasi sumber daya dan pelaksanaan.
3. Meningkatnya produktifitas pendapatan daerah, pelayanan terhadap masyarakat, dan peran serta masyarakat melalui penyaluran inspirasi dan aspirasi rakyat.

Pemberdayaan mempunyai dua arti, yang pertama yaitu empowering, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Yang kedua, pemberdayaan dalam arti enabling, yaitu pembelajaran untuk meningkatkan ability, capacity dan capability masyarakat untuk melaksanakan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberikan sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Fungsi pelayanan dapat dibagi dua yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder dan keduanya ini adalah merupakan fungsi pelayanan bersifat universal, dijalankan seluruh bangsa dan negara seluruh dunia, baik negara maju maupun sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. (Ndraha, 2005 : 75).

2.5. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang muncul setelah adanya perencanaan advokasi dan perencanaan komunikatif. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme dimana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat yang memiliki penguasaan atas masalah yang dialami. (Rappaport, 1987:122)

Sedangkan menurut Cornell Empowerment group, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan berpusat pada masyarakat lokal yang berfikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati yang mana melalui proses ini mereka yang tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut. (Perkins and Zimmerman, 1995:570)

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata '*Power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada

pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal : (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, etal, 1994:106).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.6. Manajemen

Dalam suatu organisasi manusia memainkan peran yang sangat penting, karena bagaimana pun juga sukses atau tidaknya organisasi salah satunya sangat tergantung kepada peran manusia yang ada didalamnya. Perbedaan karakteristik, pendapat dan pola pikir bisa menjadi bomerang terhadap jalannya roda organisasi. Untuk itu diperlukan suatu ilmu bagaimana mengatur sumberdaya manusia tersebut dan inilah yang lebih dikenal dengan istilah manajemen.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasibuan (2001:9) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Stoner (1996:7) dalam buku manajemen menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.

Menurut Terry (1996:1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Manullang (2001:17) memberikan batasan manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sementara itu Gibson, Donnelly dan Ivancevich (1994:4) mendefinisikan manajemen suatu sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk

mengkoordinir berbagai aktifitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak biasa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.

Sebenarnya ada banyak versi mengenai definisi manajemen, namun demikian pengertian manajemen itu sendiri secara umum yang bisa kita jadikan pegangan adalah “Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya”.

Manage atau juga yang disebut Pengelolaan diartikan sebagai suatu aktivitas organisasi mulai dari perencanaan hingga pengawasan sumber daya untuk meningkatkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Senada dengan Griffin (2002: 8) mengatakan bahwa management adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien.

Dari definisi tersebut diatas, akan dapat dijabarkan kegiatan-kegiatan atau fungsi manajemen ini. Dari berbagai fungsi manajemen yang diuraikan oleh banyak ahli, baik yang disebutkan diatas maupun yang lainnya. Memang dijumpai adanya variasi karena cara melihat kegiatan manajemen yang berbeda. Namun jika direnung dan dibandingkan fungsi yang satu dengan yang lainnya melalui pengertian-pengertian atau kegiatan menurut versi masing-masing ahli.

Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya diungkapkan dengan istilah “objectives” atau hal-hal yang nyata. Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan Terry (1996:9) yang terdiri dari :

- a. Planning, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai suatu tujuan-tujuan itu.
- b. Organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
- c. Staffing, menentukan keperluan-keperluan sumberdaya manusia, pengarahan, penyaringan dan latihan.
- d. Motivating, mengarahkan dan menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- e. Controlling, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dimana perlu.

Sementara Trisnawari dan Kurniawan (2005:11) menjelaskan beberapa fungsi manajemen yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)
 - a. Menetapkan tujuan dan target
 - b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan
 - c. Menentukan sumber daya yang diperlukan
 - d. Menentukan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
 - a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan
 - b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
 - c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

- d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi paling tepat
- 3. Pengimplementasian (*Directing*)
 - a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
 - b. Memberikan tugas dan penjelasan secara rutin mengenai pekerjaan.
 - c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
- 4. Pengawasan (*Controlling*)
 - a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
 - b. Mengambil langkah klarifikasi dan korelasi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
 - c. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target.

Unsur manajemen adalah sesuatu yang menjadi bagian mutlak sebagai pembentuk manajemen, banyak yang mengemukakan bahwa unsur manajemen seperti yang dikemukakan oleh G.R Terry dengan istilah *the six M'S in management* (6M dalam manajemen), yaitu *man, money, materials, market. And methods*.

Sesuai dengan pengertian manajemen yaitu suatu kegiatan usaha kearah pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama orang lain serta dengan pemanfaatan sumber-sumber lain yang tersedia.

Maka unsur-unsur manajemen meliputi :

- 1. Manusia (pelaksana yang handal dan terampil)
- 2. Uang (ketersediaan dana)
- 3. Mesin (perlengkapan mesin-mesin sebagai alat-alat bekerja apabila diperlukan)
- 4. Metode (cara)
- 5. Material (sarana dan prasarana)
- 6. Market (pemasaran, pemasaran dan pembudayaan)

2.7. Pengertian Evaluasi

Menurut Kamus Besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya

Menurut Dimyati (1994: 98) evaluasi adalah proses sederhana memberikan/menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan kegiatan, keputusan, petunjuk kerja, proses, orang dan masih banyak yang lainnya. Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Selanjutnya W. Dunn (2000: 13) fungsi dari evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan setelah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metoda-metoda analisa kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomentasi. Informasi

tentang tidak memadainya kebijakan.

4. Evaluasi dapat menyumbangkan pada definisi alternative kebijakan yang barn atau evisi kebijakan dengan menunjukan bahwa alternative kebijakan yang diungkapkan dan target perlu didefinisikan ulang.

Pengertian evaluasi menurut O Jones dalam Ekowati (2005 : 99) adalah "*Evaluations is judging the merit of government processes and program* " Evaluasi adalah penilaian dengan melihat proses dan program pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah sebagai berikut Ekowati (2005: 100) :

- a. Evaluasi politik. Apakah program menguntungkan kesemua negara dan wilayah? dapatkah diinterprestasikan sumbangan bagi pemilih? Dapatkah dukungan media?
- b. Evaluasi organisasi. Apakah program mendapat dukungan lembaga pelaksana? Lembaga lebih besar dari biaya? Apakah organisasi kedepan dapat melakukan ekspansi?
- c. Evaluasi subtansi. Apakah program tersebut berkesesuaian degan tujuan negara? Apakah dampak program langsung pada masalah? Menurut pendapat Nurcholis (2005: 145) yang menjelaskan 4 tipe evaluasi :
 - 1) Evaluasi kecocokan (*Appropriateness*). Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang ditetapkan tersebut memang cocok untuk dipertahankan, perlu diganti dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini cocok dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan swasta.
 - 2) Evaluasi efektifitas. Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang

dilakukan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak sesuai dengan tujuannya.

- 3) Evaluasi efisiensi. Yaitu melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber dana yang dikeluarkan. Atau dengan kata lain apakah input yang digunakan sebanding dengan output yang diharapkan. Apakah cukup efisienkah penggunaan keuangan publik dan sumber daya dalam mencapai dampak kebijakan.
- 4) Evaluasi Meta. Yaitu melakukan penilaian terhadap proses evaluasi sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional? Apakah evaluasi dilakukan tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, cultural dan lingkungan? Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial.

Menurut Beni Setiawan, (dalam Abdul Kadir Karding, 2008) perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu :

- a. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikatornya :
 - 1) Sumber daya dukungan (SDM, Uang, sarana/prasarana)
 - 2) Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
- b. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikatornya :

- 1) Tepat sasaran atau tidak
 - 2) Tepat guna atau tidak
 - 3) Efisien atau tidak
- c. *Ouput* (hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah sesuatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrumen dengan indikator sebagai berikut :
- 1) Tepat tindaknya sasaran yang ditujui.
 - 2) Beberapa besar sasaran yang tercover.
 - 3) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani.
 - 4) Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat.
- d. *Outcomes* (Dampak). Yaitu apakah sesuatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut :
- 1) Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran.
 - 2) Seberapa besar perubahan kelompok sasaran.
 - 3) Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran.

2.8. Partisipasi

Dalam pembangunan kita kenal pendekatan dari atas (*Top Down Strategy*) dan dari bawah (*Buttom Up Strategy*) dengan melihat kekuatan dan kelemahan kedua pendekatan tersebut, maka dalam program pengembangan masyarakat, pendekatan

dari bawah (dilengkapi dengan bimbingan dari atas), merupakan alternatif yang layak digunakan. Dengan pendekatan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting bahkan mutlak diperlukan. Karena pendekatan tersebut bertumpu pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta (ikut serta) dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Partisipasi saja sebagai strategi dalam program pengembangan masyarakat, tetapi ia juga menjadi hasil yang sangat diharapkan dari pada program pengembangan masyarakat.

Dengan adanya partisipasi, kita dapat memperoleh keuntungan-keuntungan antara lain:

1. Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat, yang merupakan dukungan penting bagi pembangunan.
2. Mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun.
3. Pelaksanaan pembangunan, semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
4. Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas, meskipun dengan dana yang terbatas.
5. Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya.

Partisipasi dapat ditinjau dari segi fungsi yang diambil oleh pelaku dan dari segi motivasi si pelaku partisipasi. Secara teori partisipasi dapat diurutkan dari tingkat yang paling rendah sampai yang tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan tinjauan tentang makna masing-masing partisipasi tersebut.

Partisipasi ditinjau dari fungsi yang diambil masyarakat (pelaku) untuk suatu program, fungsi yang dapat diambil oleh masyarakat dalam berpartisipasi antara lain ialah :

- a. Berperan serta dalam menikmati hasil pembangunan, karena sudah dikerjakan oleh pihak luar maka masyarakat tinggal menerima jadi berupa hasil pembangunan.
- b. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan, hal ini terjadi karena pihak luar masyarakat sudah mengerjakan persiapan, perencanaan dan menyediakan semua kebutuhan program. Masyarakat tinggal melaksanakan dan setelah itu baru bisa menikmati hasilnya.
- c. Berperan serta dalam memelihara hasil program fungsi lebih sulit, apalagi masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan. Sulit bukan saja karena tidak mempunyai keterampilan, tetapi yang lebih penting karena mereka merasa tidak memiliki program tersebut.
- d. Berperan serta dalam menilai program. Fungsi ini kadang diambil masyarakat karena diminta oleh penyelenggara program. Masyarakat merasa program tidak sesuai dengan aspirasinya, tetapi hal ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. (dikutip dari www.silaban.net/2005/10/6).

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian “*Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*” adalah skripsi dari Fauzan Azim (Universitas Islam Riau, 2012) yang berjudul “*Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa-Desa Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar*”. Membahas tentang permasalahan: bagaimanakah Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa-Desa Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Dengan landasan teorinya adalah : teori pemerintah, kebijakan, dan teori Evaluasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif. Teknik pengumpulan data : teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini penulis menjadikan sebagai pedoman dalam segi permasalahan skripsi.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah “Eko Setiwan (Universitas Riau, 2013) yang berjudul “*pengelolaan keuangan desa di desa maredan Kecamatan tualang kabupaten siak Tahun 2010-2011*”. Membahas tentang permasalahan: bagaimanakah pengelolaan keuangan desa di desa maredan Kecamatan tualang kabupaten siak Tahun 2010-2011, apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2010-2011. Dengan landasan teorinya adalah : Pengelolaan, keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif. Teknik pengumpulan data : teknik observasi,

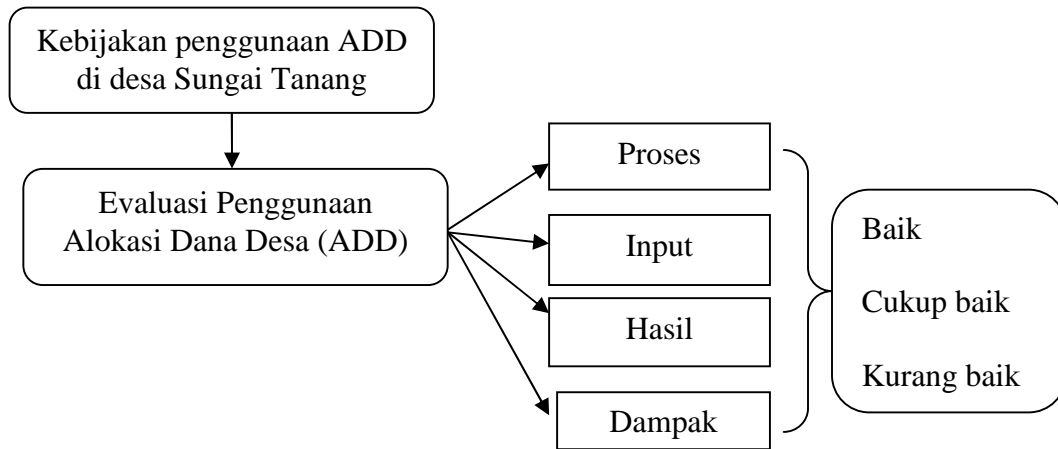
wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini penulis menjadikan sebagai pedoman dalam segi permasalahan skripsi

2.10. Kerangka Pikiran

Berdasarkan variable penggunaan alokasi dana desa kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan ubungan diantara unsur-unsur agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Dari penjelasan diatas bahwa penggunaan ADD di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara diukur dengan indikator yakni Input, proses implementasi, hasil dan dampak.

Untuk lebih jelasnya gambaran antara variable penelitian ini dengan teori yang dijadikan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi dapat disimpulkan sebagai berikut.

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.



Sumber : Modifikasi penulis, Tahun 2013

2.11. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik pengukuran.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat ukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuam Republik Indonesia dan dalam hal ini adalah Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
3. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara dan badan pemusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara yang bersumber dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dan menata Alokasi Dana Desa (ADD) demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Penggunaan ADD akan dinilai dari efektivitas penggunaan oleh pemerintahan desa berikut ini
6. Evaluasi adalah penilaian terhadap program ADD yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa khususnya di kecamatan Kecamatan Utara Seberang dengan melihat input, proses, hasil dan dampak bagi masyarakat.
 - a. Input adalah gambaran sumber dana dan rencana penggunaan ADD oleh pemerintahan desa pada pemerintah Kabupaten Kampar untuk

Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

- b. Proses adalah penilaian bagaimana proses pengguaan ADD Desa oleh pemerintah desa pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara yang dinilai dari tepat atau tidaknya program.
- c. Hasil adalah penilaian tentang hasil yang diberikan dari penggunaan ADD Desa oleh pemerintahan desa pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara.
- d. Dampak adalah penilaian tentang manfaat dari hasil program pembangunan yang didanai oleh ADD Desa pada pemerintah Kabupaten Kampar untuk Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara.

2.12. Indikator Variabel

Indikator variabel dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Variable Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Menurut Beni Setiawan, (dalam Abdul Kadir Karding, 2008) perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu : input, proses, hasil dan dampak	Evaluasi Penggunaa n ADD	Input	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber daya dukungan (Uang, SDM, sarana/prasarana) b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
		Proses	<ul style="list-style-type: none"> a. Tepat sasaran atau tidak b. Tepat guna atau tidak c. Efisien atau tidak
		Hasil	<ul style="list-style-type: none"> a. Tepat tindaknya sasaran yang ditujui. b. Beberapa besar sasaran yang tercover. c. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani. d. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat.
		Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran. b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran. c. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran

Sumber Data: Penelitian 2013

2.13. Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah dan telaah pustaka diatas maka penulis mencoba mengajukan hipotesis yang merupakan solusi sementara dari masalah yang dihadapi yaitu: “Diduga Penggunaan Alokasi Dana Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2011” karena penggunaan ADD masih di peruntukkan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar. Adapun penelitian ini dilakukan dari tanggal 1 Juni 2013 sampai 15 September 2013.

3.2. Jenis Data

Dalam penyelesaian penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut (Sugiono, 2003:156).

1. Quisioner, yaitu teknik penguimpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
2. Wawancara, yaitu melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan laporan dari diri sendiri atau setidaknya pada keyakinan pribadi.
3. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian Desa Sungai Tanang Kecamatan Utara Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar.

3.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiono, 2003: 90). Yang dijadikan populasi adalah:

Tabel 3.1
Populasi

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persen %
1	Pemerintahan Desa			
	a. Kepala Desa	1	1	11,1
	b. Kepala Urusan	1	1	11,1
	c. Kepala Dusun	2	2	22,2
	d. Ketua BPD	1	1	11,1
	e. LPM	1	1	11,1
2	Masyarakat			
	a. Tokoh Masyarakat	3	3	33,3
	Jumlah	9	9	100

Sumber: Data Olahan Lapangan 2013

b. Sampel

Sampel pada penelitian adalah pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang berjumlah 3 orang. Untuk tingkat pemerintahan desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dengan metode sensus yang terdiri dari Kepala Desa, 1 Kepala Urusan, 1 Kepala Dusun, 2 orang mewakili LPM dan Ketua BPD. Untuk keperluan penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

3.5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara Diskriptif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara untuh dan nyata yang dituangkan dalam bentuk tabel dengan angka dan persentase.

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geogarfis dan demografis

Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan sala satu desa yang memeiliki letak yang btak jauh dari ibu kota kecamatan. Letak dari desa sunagi tonang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar tidak jauh darin kota kabupaten Kampar.

Tahun 2002 desa sungai tuning memeisahkan diri dari desa Muarajalai Kabupaten Kampar yang sekarang sudah menjadi kawasan Kecamatan Kampar Utara.

Adapun batas- batas wilaya Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa bukit Sembilan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Batu Belah
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa muara jalai
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa pulau lawas

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaaten Kampar dihuni oleh berbagai suku pendatang seperti : jawa , minang , melayu dan suku kecil lainnya. Penduduk desa sunagi tonang kecamatan Kampar utara berjumlah 2073 jiwa. Dari 2073 jiwa tersebut 1024 jiwa kaum laki laki 1049 jiwa kaum perempuan. Untuk

lebih jelas nya tentang penduduk desa sungai tonang kecamatan Kampar utara dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel IV.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1	Laki Laki	1024
2	Prempuan	1049
jumlah		2073

Sumber data dari : Kantor Kepala Desa Sungai Tanang Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki laki di bandingkan perempuan yakni 1024, sedangkan perempuan berjumlah 1049 jiwa.

Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasar kelompok umur adalah seperti yang terdapat pada table berikut ini :

Tabel IV.2
Klasifikasi Penduduk Menurut Umur

No	kelompok umur	jumlah	porsentase
1	Umur 0-4 tahun	214	10.32
2	Umur 6-12 tahun	223	10.75
3	Umur 13-16tahun	227	10.95
4	Umur 17-19 tahun	214	10.32
5	Umur 20-25tahun	281	13.55
6	Umur 26-39tahun	354	17.07
7	Umur 40-55 tahun	400	19.29
8	Umur 56 tahun keatas	161	7.76
Jumlah		2073	100%

Sumber data dari : kantor kepala Desa Sungai Tonang Tahun 2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat desa sungai tanang kecamatan kampar utara yang berumur 4 tahun sebanyak 214 jiwa, yang berumur 6 samapai 12 tahun sebanyak 223 jiwa, yang berumur 13 samapai 16 tahun berjumlah 227 jiwa, yang berumur 17 smapi 19 tahun berjumlah 214 jiwa, yang berumur 20 samapi 25 tahun berjumlah 271 jiwa, yang berumur 26 samapi 39 tahun berjumlah 354 jiwa, yang berumur 40 samapi 55 tahun berjumlah 400 jiwa, yabg berumur 56 tahun berjumlah 161 dari jumlah keseluruhan yang paling banyak adalah yang berumur antara 40 smapi 45 tahun.

4.2 Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Sunagai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar keseluruhan menganut agama islam. Tmpa ada masyarakat yang menganut agama luar agama islam. Agama islam merupakan salasatu sistem nilai yang di yakini atau di jadikan pedoman hidup bagi masyarakat desa sungai tanang menjadikan agama islam sebagai nilai yang paling tinggi.

Jika dilihat dari segi sarana ibada yang menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama umat islam di desa sungai tanang kecamatan kamapar utara dapat dikatakan cukup memadai.

Selanjut nya penulis sajikan sarana ibada yang ada di desa sungai tanang kecamatan kampar uatara. Adapun sarana yang dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3
Jumlah Sarana Ibadah

No	Nama dusun	Mesjid	Mushollah
1	Dusuns I Sungai Tonang	1	2
2	Dusuns I Sungai Tonang	1	2
Jumlah		2	4

Sumber data dari : kantor kepala desa sungai tonang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa didesa sungai tonang kecamatan kampar utara terdapat 2 (dua) buah mesjid dan 4 (buah) mushollah dari kedua mesjid tersebut masing masing terletak di dusun 1 sungai tonang dan dusun 2 sungai toang sedangkan untuk mushollah yang berjumlah 4 (empat) buah di desa sungai tonang masing masing mushollah terdapat di dusun 1 sungai tonang berjumlah 2 (dua) buah mushollah dan dusun 2 terdapat 2 (dua)buah mushollah. Sedang untuk gereja tidak ada sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di desa sungai tonang kecamatan kampar utara berjumlah 6 (enam) buah.

Desa sungai tonang kecamatan kampar utara berjarak lebih kurang 7 kilometer dari ibu kota dari ibu kota kabupaten . namun perkembangan dalam bidang pendidikan tergolong pesat walupun tidak sepesat yang ada di kota hal ini terlihat dari tabel berikut :

Tabel IV.4
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	1
2	SD	2
3	MTS	1
4	MA	1
5	MDA	1
JUMLAH		6

Sumber data dari : kantor kepala Desa Sungai Tonang Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah terpenuhi untuk setiap tingkat pendidikan sekolah. Misalnya desa sungai tonang kecamatan kampar utara sudah terdapat 6 (enam) buah sarana pendidikan sekolah yaitu tingkat TK,SD,MTS,MA,MDA.

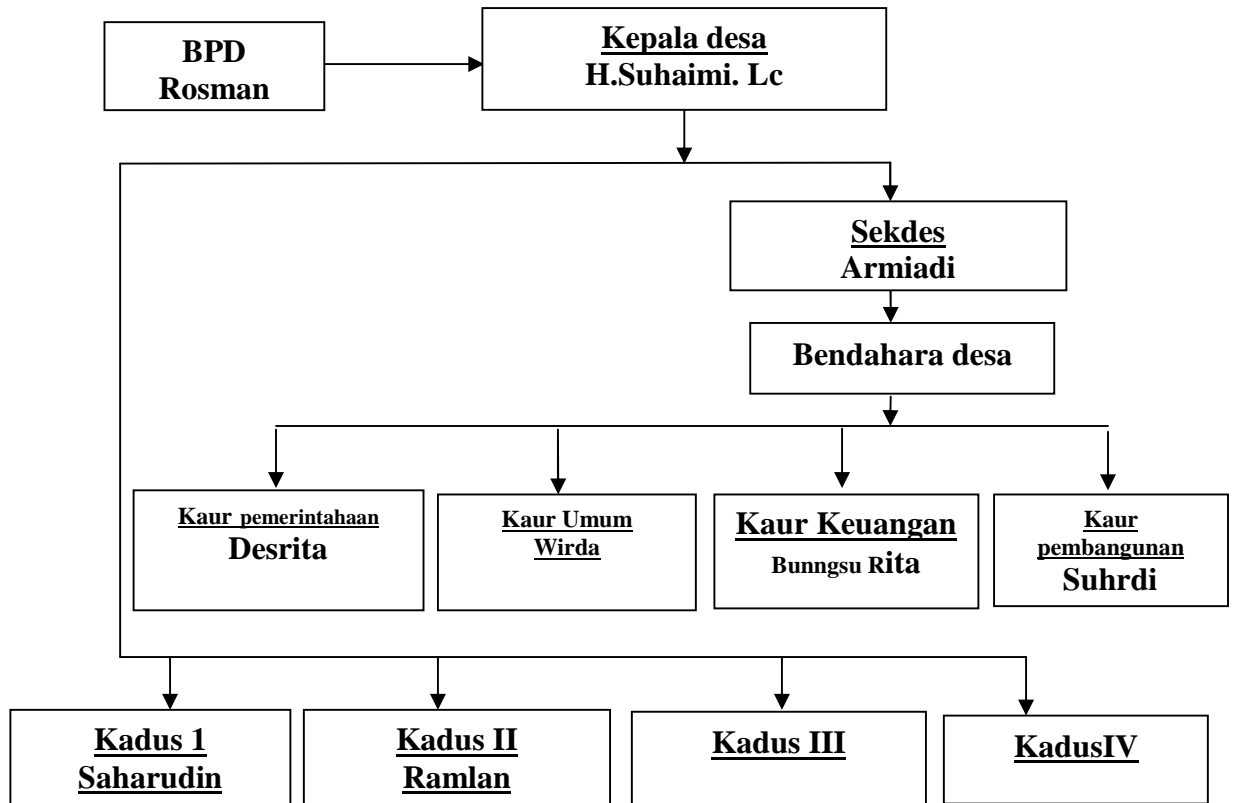
4.3 Pemerintahan

Pemerintahan desa sungai tonang kecamatan kampar utara kabupaten kampar tidak jauh berbeda dengan desa yang lainnya. Dalam struktur perangkat desa pemerintah desa sungai tonang kecamatan kampar utara kabupaten kampar di pimpin oleh seorang kepala desa yang di tunjuk melalui proses pemilihan kepala desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintah desa.

Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah desa sungai tonang kecamatan kampar utara kabupaten kampar. Seorang kepala desa di bantu oleh seorang sekretaris desa (sekdes) dan beberapa orang kepala urusan (Kaur) . kepala desa merupakan

eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan dilakukan oleh pengawasan oleh legislatif desa tersebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Gambar : IV.1
Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Tonang



Sumber: Monografi Desa Sungai Tonang Tahun 2012

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa . kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggung jawab pada camat
2. Sekretaris desa merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas dalam membantu kerja kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa

3. Kepala urusan (Kaur) pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi bidang pemerintah.
4. Kepala urusan (Kaur) pembangunan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan desa
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merupakan lembaga tinggi yang ada di desa mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melakukan kerja sama dengan kepala desa.
6. Kepala dusun (Kadus) merupakan wakil dari kepala desa pada setiap dusun yang ada. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing –masing.

4.4 Sosial Ekonomi Dan Adat Istiadat

Mata pencarian masyarakat desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat desa sungai tang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar jenis usaha tani karet dan kelapa sawit, karena topografi tanah sangat mendukung usaha tani karet dan kelapa sawit tersebut. Disamping melakukan usaha tani karet dan kelapa sawit ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan yaitu melakukan usaha perdagangan , peternakan dan usaha pengolahan kayu.

Potensi pengembangan ekonomi desa sungai tang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan

perkebunan karet. Selain dari itu Desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga memiliki usaha tani sayur- sayuran karena tanahnya sangat subur. Selain dari usaha pengembangan usaha tani, di Desa sungai tonag Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga cocok di kembangkan sektor perternakan , karena didukung oleh luasnya padang rumput yang ada di desa sungai tonang .

Masyarakat desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menganut sistem sosial dengan menggunakan adat istiadat yang mengatur tatacara pergaulan sosial dalam masyarakat di desa. Masyarakat juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan, masyarakat desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukan upacara syukuran pertanai yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan kegotongroyongan dalam membangun desa

Adat yang digunakan bukanlah landasan kontrol sosial yang utama melainkan konsep agama islam sebagai pedoman utama mereka, sehingga dikenal dengan istilah adat bersandi sara”sara” bersendi kitabullah. Adapun pemuka adat desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berjumlah 5 orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku suku yang ada diangkat oleh kemonakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemonakan yang memahami adat secara baik dan benar.

4.5 Sarana Transportasi Dan Komunikasi

Sarana transportasi yang ada di desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar jalannya sudah di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sarana transportasi di desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga menggunakan transportasi angkutan umum yakni becak/ kendaraan yang roda tiga yang beroperasi setiap harinya. Dalam keseharian transportasi tersebut dapat juga di gunakan masyarakat untuk pergi kepasar dan juga dapat juga dipakai untuk mengangkut barang dagangan. Sarana komunikasi di desa sungai tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sudah menggunakan telpon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga bisa menerima berbagai informasi dan berita berita melalui televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat tentang Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

5.1 Identitas Responden

Identitas responden perlu dikemukakan dalam suatu penelitian supaya data yang diperoleh betul-betul dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Adapun identitas responden yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan responden. Untuk mendapatkan data yang jelas dan dapat dipercaya maka peneliti merasa perlu mengidentifikasi responden dalam penelitian ini yang akan dilakukan berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan responden.

5.1.1 Jenis Kelamin

Salah satu kriteria yang ditetapkan untuk melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian adalah jenis kelamin. Dalam penelitian ini memiliki tingkat responden yang berbeda, baik responden aparatur pemerintah maupun responden masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden aparatur pemerintah yang digolongkan jenis kelamin responden

merupakan langkah awal penelitian sebagaimana yang akan dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel V.1
Jenis Kelamin Responden Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar

No.	Jenis Kelamin	Pemerintah Desa Sungai Tanang	Masyarakat Desa Sungai Tanang	Jumlah
1.	Laki-laki	4	2	6
2.	Perempuan	2	1	3
Jumlah		6	3	9

Sumber : Data Olahan 2013

Pada tabel V.1 di atas diketahui bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 6 orang dan perempuan 3orang. Hal ini diketahui bahwa laki-laki lebih mudah memberikan informasi terhadap analisis pelayanan publik pada lokasi penelitian.

5.1.2 Umur

Identitas responden berdasarkan umur adalah mengenai usia dari masing-masing responden yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2
Umur Responden Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten
Kampar

No.	Tingkat Umur (Tahun)	Pemerintah Desa Sungai Tanah	Masyarakat Desa Sungai Tanang	Jumlah
1.	18 – 25	1	1	2
2.	26 – 33	2	1	3
3.	34 – 41	2	1	3
4.	42 – 50	1	-	1
Jumlah		6	3	9

Sumber : Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel V.2 di atas diketahui bahwa tingkat umur yang produktif adalah umur 18–25 tahun berjumlah 1 orang, umur 26-33 berjumlah 2 orang, umur 34-41 berjumlah 2 orang dan 42-50 berjumlah 1 orang. Dengan demikian masalah tentang Analisis penggunaan alokasi dana desa tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dapat ditarik kesimpulan bahwa responden berada pada tingkatan umur yang produktif dan dewasa sehingga dapat dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan.

5.1.3 Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh responden sehari-hari dalam memperoleh pendapatannya.

Tabel V.3
Jenis Pekerjaan Responden Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	22,2
2	Pegawai Honorer	1	11,2
3	Wiraswasta	2	22,2
4	Petani	2	22,2
5	Pedagang	2	22,2
Jumlah		9	100

Sumber : Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel V.2 di atas diketahui bahwa para responden yang bekerja pada PNS berjumlah 2 orang, pegawai honorer 1 orang, wiraswasta 2 orang, petani 2 orang dan pekerjaan pedagang berjumlah 2 orang.

Untuk menilai pelaksanaan analisis penggunaan alokasi dana desa tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar maka dalam penelitian ini Edward A. Schuman (dalam Winarno, 2012:233-234) yang mengemukakan ada 5 langkah dalam kebijakan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tujuan program dalam penelitian ini adalah untuk mencari, menilai tujuan-tujuan program yang berdampak dalam suatu kebijakan yang berdampak dalam suatu kebijakan yang dibuat untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.
- b. Analisis terhadap masalah digunakan di dalam penelitian ini untuk menilai, mencari, dan meneliti terhadap suatu masalah di dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

- c. Deskripsi didalam penelitian ini digunakan untuk penjabaran/pemaparan dari suatu kegiatan yang dilakukan didalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan/dilakukan oleh pihak yang terkait, dan Standarisasi kegiatan adalah nilai ukuran yang telah ditetapkan /ditentukan didalam menjalankan suatu kebijakan/kegiatan.
- d. Hal ini diartikan/digunakan dalam penelitian ini menilai dan mengukur sampai sejauh mana tingkat perubahan yang terjadi pada suatu kebijakan yang telah dijalankan oleh pihak terkait, apakah perubahan terjadi berjalan atau tidak berjalan.
- e. Penjelasan ini digunakan untuk menentukan suatu permasalahan untuk dalam pelaksanaan kebijakan/program sistem angkutan umum massal tersebut atau masalah yang terjadi diluar dari kegiatan tersebut.

5.2 Tujuan Program ADD

Yang dimaksud dengan mengidentifikasikan tujuan program dalam penelitian ini adalah untuk mencari, menilai tujuan-tujuan program yang berdampak dalam suatu kebijakan yang dibuat untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, Begitu juga dengan pelaksanaan kebijakan "Tentang Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut

menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui pemerintah daerah berupaya memberdayakan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan melalui penggunaan ADD yang tepat guna. Tetapi Penggunaan ADD di desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Utara belum secara efektif dan efisien contohnya Penggunaan ADD di desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Utara lebih diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa sementara untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.

Adapun tanggapan responden masyarakat berada pada kriteria baik bahwa aturan-aturan mengenai kebijakan dalam ” Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar,” serta evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” dijelaskan oleh Peraturan Bupati Kampar No 9 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa.

Mengidentifikasi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari, menilai tujuan-tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdampak dalam suatu kebijakan yang dibuat untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Guna melihat hal tersebut, dapat dilihat melalui hasil wawancara dibawah ini.

Dari hasil wawancara tersebut pihak Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang terkait dengan kebijakan sistem Alokasi Dana Desa ditinjau dari aspek pengadaan dan pembangunan teknis di Desa-desanya Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam mengurangi tingkat

belanja rutin dan operasional kepala desa yang selama ini biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.

Pertama, didalam item penilaian menentukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Desa dan organisasi Desa yang ada di Desa Sungai Tanang, dalam wawancara dengan pihak aparaturnya menyampaikan bahwa :

" Mengenai pelanggaran yang terjadi merupakan kelalaian yang kemudian akan segera dilaksanakan analisis dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD),"
(Kepala Desa Sungai Tanang Bapak Suhaimi, Lc, 2 Juni 2013)

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Desa dan organisasi Desa yang ada di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dalam wawancara dengan masyarakat, mengatakan :

" Dari data setiap tahunnya mengenai laporan, tingkat pelanggaran yang ada menurun, ini berarti bahwa didalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki sudah dipahaminya " pelanggaran dalam penggunaan Alokasi dana desa (ADD) tersebut merupakan dari lemahnya pengawasan dan tidak adanya petugas yang turun ke lapangan untuk mensosialisasikan mengenai penggunaan alokasi dana (ADD) tersebut. (Lukman, 17 Juni 2013)

Sedangkan menurut pihak aparaturnya pada item penilaian diatas adalah:

" Masalah mengenai pelanggaran yang terjadi jika itu terbukti maka akan diberikan sanksi tegas baik berupa teguran maupun akan dipecat oleh yang berwenang ".
(Kepala Desa Sungai Tanang Bapak Suhaimi, Lc, 20 Juni 2013)

Kedua, pada item penilaian mengenai akibat dilaksanakannya program/kebijakan Tentang Peraturan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), pihak organisasi desa dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa :

" Program ini tidak hanya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah saja, melainkan juga bekerja sama dengan seluruh pihak terkait. Dengan kata lain, alokasi dana telah memberikan kebijakan yang tepat dengan memberikan pelayanan yang aman, nyaman, cepat, mudah, dan berkelanjutan. Semua ini juga memerlukan

bantuan dari masyarakat untuk memajukannya ”. (Kaur Desa Sungai Tanang Ibu Wirdatuljannah, 29 Juni 2013)

Sedangkan Masyarakat menyampaikan tanggapan bahwa :

” Akibat penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini seharusnya dapat berjalan dengan lancar apabila pihak pelaksana program dan yang menjadi sasaran program dapat bekerja sama dalam penggunaan alokasi dana desa tersebut”.

(Lukman, 3 Juli 2013)

Dari analisis wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa aparat pemerintah telah memberikan pelayanan yang cukup baik dan telah mengeluarkan serta menjalankan program/kebijakan walaupun belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan.

Ketiga, mengenai analisis data dalam item penilaian masih lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak pemerintah daerah yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak aparat desa mengatakan :

” Petugas-petugas yang melaksanakan tugas pengawasan baik di lapangan maupun yang patroli telah menjalankan tugasnya dengan baik, apabila ada terjadi pelanggaran maka akan ada laporan kepada pemerintah daerah tersebut ”. (Kepala Desa Sungai Tanang Bapak Suhaimi, Lc, 15 Juli 2013)

Sedangkan masyarakat menyampaikan tanggapan bahwa :

” Petugas-petugas yang ada di pemerintah daerah dan desa belum begitu kuat untuk menjalankan tugas tentang pengawasan dan peraturan pemerintah daerah dan masih separuh-separuh menjalankan tugas yang ada dilapangan sehingga masih banyak terdapat jenis pelanggaran dalam peraturan tersebut.”

(Lukman, 21 Juli 2013)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak pemerintah daerah dan pihak aparat Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar bahwa dalam Peraturan Bupati Kampar No 9 tahun 2011 Tentang Pedoman

Umum Alokasi Dana Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 2 menyebutkan pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan. Tapi para aparat pemerintah desa belum begitu kuat untuk menjalankan tugasnya dan masih separuh-separuh dalam menjalankan tugas sehingga masih banyak terdapat pelanggaran dalam peraturan tersebut.

5.3 Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 untuk Program ADD

Analisis terhadap masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menilai, mencari dan meneliti apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan masyarakat terhadap suatu masalah di dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Penelitian Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang diteliti berdasarkan empat indikator setiap Tanggapan yaitu Input, Proses, Hasil, dan Dampak. Berikut gambaran data untuk setiap indikator.

- a. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan Kepala Desa Sungai Tonang tersebut dengan indikator Input dilakukan menggunakan sebelas item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.4
Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Input: Sumber Daya Dukungan dan Bahan Dasar Pendukung

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	KB	
1.	Mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kampar Utara	4	1	1	6
2.	Jumlah ADD pada tahun 2011 di Desa Sungai Tonang Rp.253.000.000'	3	1	2	6
3.	Jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan desa dalam pembangunan	3	1	2	6
4.	Sumber daya pengelola Alokasi Dana Desa di setiap Desa di Kecamatan Kampar Utara	2	3	1	6
5.	Dalam mengelola alokasi dana desa menurut bapak pengetahuan yang dimiliki pengelola Alokasi Dana Desa	4	1	1	6
6.	Menurut bapak pembagian kerja oleh pengelola Alokasi Dana Desa	2	3	1	6
7.	Setiap desa di Kecamatan Kampar Utara memiliki sarana penunjang pengelolaan Alokasi Dana Desanya	2	1	3	6
8.	Perangkat kerja yang dimiliki pengelola dalam mengelola Alokasi Dana Desa	2	3	1	6
9.	Keadaan perangkat kerja yang dimiliki pengelola dalam mengelola Alokasi Dana Desa	1	4	1	6
10.	Dalam mengelola Alokasi Dana Desa setiap desa di kecamatan kampar utara memiliki perangkat kerja	3	2	1	6
11.	Teknologi terkini untuk mengakses pengelolaan ADD setiap desa	3	1	2	6
	Jumlah	29	21	16	66
	Rata-rata	3	2	1	6
	Persentase	44	31,8	24,2	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 3 responden mengatakan baik (persentase 44%), namun masih ada rata-rata 2 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 31,8%), bahkan ada rata-rata 1

responden yang mengatakan kurang baik (persentase 24,2%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

b. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan Kepala Desa Sungai Tonang tersebut dengan indikator proses dilakukan menggunakan lima item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.5
Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Proses: Tepat Sasaran, Tepat Guna atau Tidak dan Efisien atau Tidak

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	KB	
1.	Program dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh desa sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang	4	1	1	6
2.	Kebijakan desa yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan	3	1	2	6
3.	Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengelola ADD di kecamatan kampar utara	3	1	2	6
4.	Program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kecamatan kampar utara dalam mengelola ADD sesuai dengan anggaran	2	3	1	6
5.	Program yang dijalankan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	4	1	1	6
	Jumlah	16	7	7	30
	Rata-rata	4	1	1	6
	Persentase	53,4	23,3	23,3	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 4 responden mengatakan baik (persentase 53,4%), namun masih ada rata-rata 1 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 23,3%), bahkan ada rata-

rata 1 responden yang mengatakan kurang baik (persentase 23,3%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

c. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan Kepala Desa Sungai Tonang tersebut dengan indikator hasil dilakukan menggunakan lima item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.6
Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Hasil: Tepat Tindaknya Sasaran Yang Ditujui, Beberapa Besar Sasaran Yang Tercover, Seberapa Banyak Kelompok Sasaran Yang Tertangani Dan Seberapa Besar Kelompok Sasaran Yang Terlibat

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	KB	
1.	Hasil kebijakan pemerintahan desa sungai tanang di Kecamatan kampar utara dalam mengelola ADD	3	2	1	6
2.	kendala-kendala yang dilaporkan pemerintah desa dalam mengelola ADD	3	1	2	6
3.	hasil pengelolaan ADD oleh pemerintahan desa di Kecamatan kampar utara sesuai dengan kondisi di desa	3	2	1	6
4.	rencana pembangunan di desa terbantu oleh adanya Alokasi Dana Desa	2	3	1	6
5.	sasaran pembangunan Alokasi Dana Desa di desa sungai tanang sesuai dengan prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah	4	1	1	6
	Jumlah	15	9	6	30
	Rata-rata	3	2	1	6
	Persentase	50	30	20	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 3 responden mengatakan baik (persentase 50%), namun masih ada rata-rata 2 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 30%), bahkan ada rata-rata 1

responden yang mengatakan kurang baik (persentase 20%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

d. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan Kepala Desa Sungai Tonang tersebut dengan indikator dampak dilakukan menggunakan lima item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.7
Tanggapan Aparatur Desa Mengenai Indikator Dampak: Ada Atau Tidak Perubahan Pada Target/Sasaran, Seberapa Besar Perubahan Kelompok Sasaran Dan Seberapa Signifikan Perubahan Yang Terjadi Pada Kelompok Sasaran

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	KB	
1.	Alokasi Dana Desa menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat	2	2	2	6
2.	Peningkatan sarana dan prasarana desa setelah adanya Alokasi Dana Desa di desa sunagi tanag Kecamatan kampar utara	3	1	2	6
3.	Peningkatan jumlah sarana yang dimiliki desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menambah kualitas pelayanan perangkat desa terhadap masyarakat	3	2	1	6
4.	kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kepada pemerintahan desa sunagi tanang	3	2	1	6
5.	Partisipasi masyarakat di desa sungai tanang dalam membangun desa	4	1	1	6
	Jumlah	15	8	7	30
	Rata-rata	3	2	1	6
	Persentase	50	26,6	23,4	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 3 responden mengatakan baik (persentase 50%), namun masih ada rata-rata

2 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 26,6%), bahkan ada rata-rata 1 responden yang mengatakan kurang baik (persentase 23,4%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

e. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan masyarakat Sungai Tonang tersebut dengan indikator input dilakukan menggunakan dua belas item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.8
Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Input: Sumber Daya Dukungan dan Bahan Dasar Pendukung

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	K B	
1.	bapak/ ibu ikut serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Di desa ini	2	1	-	3
2.	jumlah Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa sungai tanang	2	1	-	3
3.	jumlah yang diberikan oleh pemerintah daerah setahu anda	1	1	1	3
4.	Menurut bapak/ ibu apakah jumlah tersebut membantu pembangunan infrastruktur desa dan menambah pelayanan desa	2	1	-	3
5.	Menurut bapak dalam mengelola Alokasi Dana Desa apakah desa membagi pengelola dana desa dalam tim	1	1	1	3
6.	Menurut bapak/ibu pembagian kerja oleh pengelola Alokasi Dana Desa	1	-	2	3
7.	menurut bapak/ibu pengetahuan yang dimiliki pengelola Alokasi Dana Desa	1	1	1	3
8.	Menurut bapak/ ibu sarana penunjang yang dimiliki desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa	-	2	1	3
9.	Menurut bapak/ ibu bagaimana peralatan yang dimiliki desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa	2	-	1	3

10.	bagaimana kondisi peralatan yang dimiliki desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa	1	1	1	3
11.	penggunaan teknologi yang diberikan dalam mengelola ADD di desa ini dalam meningkatkan transparansi	1	2		3
12.	kondisi teknologi yang diberikan dalam mengelola ADD di desa ini dalam meningkatkan transparansi	1	1	1	3
Jumlah		15	12	9	36
Rata-rata		1	1	1	3
Persentase		41,6	33,4	25	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 1 responden mengatakan baik (persentase 41,6%), namun masih ada rata-rata 1 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 33,4%), bahkan ada rata-rata 1 responden yang mengatakan kurang baik (persentase 25%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

f. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan masyarakat Sungai Tonang tersebut dengan indikator Proses dilakukan menggunakan enam item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.9
Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Proses: Tepat Sasaran, Tepat Guna atau Tidak dan Efisien atau Tidak

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	KB	
1.	penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintahan desa	1	2	-	3
2.	program Alokasi Dana Desa dijalankan oleh desa sesuai dengan aturan penggunaan	1	1	1	3
3.	kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa dalam mengelola ADD tepat sasaran	1	1	1	3
4.	hasil kebijakan program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dapat meningkatkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat	2	-	1	3
5.	program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa sesuai dengan anggaran yang diberikan	1	1	1	3
6.	program yang dijalankan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	1	1	1	3
	Jumlah	7	6	5	18
	Rata-rata	1	1	1	3
	Persentase	38,9	33,3	27,8	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 1 responden mengatakan baik (persentase 38,9%), namun masih ada rata-rata 1 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 33,3%), bahkan ada rata-rata 1 responden yang mengatakan kurang baik (persentase 27,8%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

g. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan masyarakat Sungai Tonang tersebut dengan

indikator hasil dilakukan menggunakan tujuh item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.10
Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Hasil: Tepat Tindaknya Sasaran Yang Ditujui, Beberapa Besar Sasaran Yang Tercover, Seberapa Banyak Kelompok Sasaran Yang Tertangani Dan Seberapa Besar Kelompok Sasaran Yang Terlibat

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	KB	
1.	hasil kebijakan pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa	1	2	-	3
2.	ketepatan program yang dijalankan dalam mengelola ADD oleh pemerintah desa	1	1	1	3
3.	semua program yang direncanakan pemerintah desa dapat di tanggulangi oleh dana Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah	1	1	1	3
4.	Program dan sasaran yang di danai ADD oleh pemerintah desa pada tahun 2011	2	-	1	3
5.	keterlibatan masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa	1	1	1	3
6.	kendala-kendala dalam mengelola ADD oleh pemerintah desa	1	2	-	3
7.	penanganan kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintahan desa	1	1	1	3
	Jumlah	8	8	5	21
	Rata-rata	1	1	1	3
	Persentase	38,1	38,1	23,8	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 1 responden mengatakan baik (persentase 38.1%), namun masih ada rata-rata 1 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 38.1%), bahkan ada rata-rata 1 responden yang mangatakan kurang baik (persentase 23.8%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

h. Untuk mengetahui gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang ditinjau dari tanggapan masyarakat Sungai Tonang tersebut dengan indikator dampak dilakukan menggunakan lima item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.11
Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Dampak: Ada Atau Tidak
Perubahan Pada Target/Sasaran, Seberapa Besar Perubahan Kelompok
Sasaran Dan Seberapa Signifikan Perubahan Yang Terjadi Pada Kelompok
Sasaran

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jml
		B	CB	KB	
1.	Peningkatan sarana dan prasarana desa melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa	1	1	1	3
2.	kualitas pelayanan perangkat desa terhadap masyarakat	1	2	-	3
3.	masyarakat yang komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa	2	1	-	3
4.	besar masyarakat desa yang yang komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa	2	-	1	3
5.	bagaimana Partisipasi masyarakat desa dalam membantu pembangunan desa	1	1	1	3
	Jumlah	7	5	3	15
	Rata-rata	1	1	1	3
	Persentase	46,7	33,3	20	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa rata-rata 1 responden mengatakan baik (persentase 46,7%), namun masih ada rata-rata 1 responden yang mengatakan cukup baik (persentase 33,3%), bahkan ada rata-rata 1 responden yang mengatakan kurang baik (persentase 20%). Hal itu disebabkan karena Alokasi Dana Desa belum keseluruhannya tepat sasaran.

Secara keseluruhan dari responden pemerintah desa dan masyarakat pada indikator input, proses, hasil dan dampak dalam evaluasi Penggunaan ADD tahun 2011 di Desa Sungai Tanang dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini :

Tabel V.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Desa Mengenai Evaluasi
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Desa Sungai Tanang

No	Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Input	3	2	1	6
		44%	31,8%	24,2%	100%
2	Proses	4	1	1	6
		53,4%	23,3%	23,3%	100%
3	Hasil	3	2	1	6
		50%	30%	20%	100%
4	Dampak	3	2	1	6
		50%	26,6%	23,4%	100%
	Jumlah	13	7	4	24
	Rata-rata	3	2	1	6
	Persentase	53%	30%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Tanggapan aparatur desa (pemerintah desa) berada pada kriteria cukup baik dari item penilaian tujuan program sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dimana 6 orang responden memberikan jawaban cukup baik. Hal ini dikarenakan bahwa pihak aparatur desa telah bekerja sebaik mungkin walaupun masih ada dari beberapa orang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam hal Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Tabel V.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Evaluasi
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Desa Sungai Tanang

No	Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Input	1	1	1	3
		41,6%	33,4%	25%	100%
2	Proses	1	1	1	3
		38,9%	33,3%	27,8%	100%
3	Hasil	1	1	1	3
		38,1%	38,1%	23,8%	100%
4	Dampak	1	1	1	3
		46,7%	33,3%	20%	100%
	Jumlah	4	4	4	12
	Rata-rata	1	1	1	3
	Persentase	41,3%	34,5%	24,2%	100%

Sumber : Olahan Data Tahun 2011

Tanggapan masyarakat didalam item penilaian menentukan bentuk pelanggaran berada pada kriteria cukup baik, hal ini dikarenakan hampir semua responden masyarakat telah mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa untuk penggunaan Alokasi Dana Desa.

Tanggapan responden masyarakat pada penggunaan Alokasi Dana Desa memperoleh jawaban cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat masih jarang melihat pihak pemerintah desa turun untuk melihat dan memantau keadaan desa dan masyarakat tersebut, sehingga masih banyak kejadian yang membuat masyarakat

belum merasa maksimal dalam ”Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Dari alasan tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat menyatakan pihak pemerintah desa telah melaksanakan tujuan program/kebijakan walaupun masih terdapat kekurangan di dalam Penggunaan Alokasi Dana sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Seharusnya pihak pemerintah desa lebih memperbanyak lagi mengontrol desa dan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi.

5.4 Hambatan-hambatan

Dalam menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak tentu segampang yang kita kira, banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa.

Seperti dalam Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, banyak di temui hambatan-hambatan dalam menjalankannya, adapun bentuk hambatannya yaitu:

1. Sumber daya manusia yang dimiliki di Desa Sungai Tanang kurang dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Dari segi pendidikan pemerintah desa di Desa Sungai Tanang yang belum berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi
3. Dari segi umur pemerintah desa di Desa Sungai Tanang yang belum berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi

4. Kurangnya koordinasi dari Kecamatan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam gotong royong di dalam pembuatan sarana dan prasarana yang menggunakan ADD sehingga biaya yang dikeluarkan Kurang efisien.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penggunaan ADD pada Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ditinjau dari beberapa indikator dalam Analisis penggunaan ADD cukup baik. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing pihak yaitu instansi terkait dan keluhan-keluhan dari masyarakat setempat, tetapi perbedaan pendapat tersebut masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan keluhan dari masyarakat Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat dijadikan batu loncatan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk masyarakat.
2. Masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa tentang penggunaan Alokasi Dana Desa. Dari alasan tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat menyatakan pihak pihak pemerintah desa telah melaksanakan tujuan program/kebijakan walaupun masih terdapat kekurangan di dalam Penggunaan Alokasi Dana sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Seharusnya pihak pemerintah desa lebih

memperbanyak lagi mengontrol desa dan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi.

6.2 Saran

1. Disarankan kepada kepala desa Sungai Tanang agar menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati No.9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa.
2. Disarankan kepada kepala desa untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam bentuk pembinaan hubungan baik atau *human relations* kepada satuan kerja di wilayah desa agar masing-masing bagian memberikan kontribusi maksimal terhadap pelayanan masyarakat.
3. Disarankan juga kepada Pegawai kantor kepala desa Sungai Tanang untuk dapat meningkatkan kinerja dalam menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan maksimal dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Karding. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi
- Arifin P Soeria Atmaja. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta. Rajawali Pers
- Dunn William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Erman Rajagukguk. *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*. Hukum online. diakses 11 April 2013
- Griffin. 2002. *Manajemen Jilid 1, Edisi 7*. Alih bahasa Gina Gania. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hariyadi B. Sukamdani. *Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan*. Hukum online. diakses 11 April 2013
- Hasibuan Melayu, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara: Jakarta
- Hekinus Manao, *Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan*, Hukum online. diakses 11 April 2013
- Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. YPAPI. Yogyakarta
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Kristian Widya Wicaksono. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Manullang, M. Dan Manullang Marihot. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama*. Cetakan Pertama. Yogyakarta:BPFE.
- Muhammad Djumhana. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung. Citra Aditya Bakti

- Nogi S. Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Nugroho Riant. 2004. *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Alex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Parsons, Ruth J., dkk, 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California:Wadsworth, Inc.
- Peraturan Bupati Kampar No. 9 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Perkins D, Zimmerman MA. 1995. *Empowerment Theory, Research, and Application*. Di Dalam *American Journal of Community Psychology*, <http://www.proquest.umi.com/pqdweb?> [5 Maret 2013]
- Rappaport. 1987. "Terms of Empowerment: Toward a theory for Community Psychology". *American Journal of Community Psychology*
- Stoner, James A.F. 1996. *Manajemen (Terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Taliziduhu Ndraha. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Terry. 1996. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Tisnawati Sule Ernie dan Saefullah Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Kencana
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

www.silaban.net/2005/10/6